

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan fondasi pembangunan bangsa dan kualitasnya menentukan arah peradaban, daya saing sumber daya manusia, serta kapasitas negara dalam menghadapi tantangan global. Di Indonesia kualitas tersebut mencerminkan paradoks karena kebijakan dan infrastruktur terus membaik, tetapi capaian hasil belajar masih tertinggal. Laporan PISA 2022 terbitan OECD menunjukkan bahwa skor literasi membaca dan numerasi peserta didik Indonesia berada pada kuintil terbawah, hanya sekitar sepuluh persen siswa mencapai kompetensi minimum matematika, sedangkan skor membaca menempatkan Indonesia di peringkat ke-69 dari 81 negara (OECD, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional belum efektif membawa peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan pada tingkat internasional.

Rendahnya capaian hasil belajar menimbulkan paradoks apabila disandingkan dengan besarnya investasi pemerintah di sektor pendidikan. Amanat Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan pemerintah mengalokasikan paling sedikit 20 persen dari APBN dan APBD untuk pendidikan. Pada tahun 2024, anggaran pendidikan bahkan diproyeksikan mencapai sekitar Rp 660,8 triliun, nilai tertinggi sepanjang sejarah (Kementerian Keuangan, 2023). Namun berbagai studi dan laporan audit menunjukkan bahwa kenaikan alokasi dana belum disertai optimalisasi pemanfaatannya. Laporan gabungan Kementerian Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2023 mencatat persoalan transparansi pelaporan serta rendahnya penyerapan anggaran pendidikan, terutama pada program BOSP, Dana Alokasi Khusus pendidikan, dan belanja modal sektor pendidikan (JurnalPost, 2023).

Dalam perspektif manajemen pembiayaan pendidikan, anggaran merupakan *input* strategis yang secara langsung menentukan mutu layanan pendidikan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung berbagai komponen esensial, seperti penyediaan sarana dan prasarana, pendanaan tenaga pendidik dan

kependidikan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, serta kegiatan evaluasi hasil belajar. Oleh karena itu, tanpa pembiayaan yang memadai, terencana, dan dikelola secara transparan dan akuntabel, upaya pencapaian mutu pendidikan yang optimal menjadi mustahil terwujud (Wahyudin, 2021). Transparansi bukan hanya sekadar formalitas pelaporan, tetapi menjadi prasyarat untuk membangun kepercayaan publik serta menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan dana pendidikan.

Selaras dengan pentingnya fungsi anggaran di level mikro (sekolah), pada level makro, pembiayaan pendidikan juga menempati posisi yang sangat strategis dalam sistem pendidikan nasional karena menjadi fondasi utama bagi tercapainya akses yang luas, mutu yang merata, dan keadilan dalam layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, dalam kerangka kebijakan nasional, pembiayaan diposisikan sebagai instrumen vital negara dalam merealisasikan amanat konstitusi, yakni "mencerdaskan kehidupan bangsa" sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Ayat 3. Komitmen negara terhadap pembiayaan ini diwujudkan dalam berbagai kebijakan afirmatif, seperti alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN/APBD, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta sistem pelaporan keuangan berbasis digital. Semua ini menunjukkan bahwa transparansi dan efektivitas pembiayaan tidak hanya menjadi urusan teknis administratif, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan yang bermutu.

Lebih lanjut, Rusdiana (2021) menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan unsur inti dalam manajemen strategik pendidikan karena berperan menentukan arah prioritas pembangunan serta menjadi dasar dalam perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung operasional sekolah, tetapi juga sebagai jaminan keberlangsungan institusi pendidikan di tengah dinamika sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, pembiayaan menjadi sarana untuk memastikan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara sistematis dan berkelanjutan, sekaligus mencerminkan keberpihakan negara terhadap pembangunan manusia sebagai investasi jangka panjang bangsa. Sejalan dengan peran strategis tersebut, anggaran

pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat disalurkan untuk membiayai seluruh jenjang pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK), hingga pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta. Alokasi ini tidak hanya mencakup biaya operasional rutin, tetapi juga diarahkan untuk mendanai pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan, penguatan sistem tata kelola yang akuntabel dan partisipatif, serta peningkatan kapasitas kelembagaan sekolah agar mampu menjawab tantangan pendidikan abad ke-21. Dengan demikian, pembiayaan pendidikan tidak bisa dipandang sebagai sekadar pengeluaran negara, melainkan sebagai investasi strategis yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas generasi penerus bangsa.

Secara struktur, pembiayaan pendidikan terbagi menjadi tiga jenis utama, salah satunya adalah biaya operasional. Biaya operasional yang bersumber dari pemerintah memikul tanggung jawab utama dalam menyediakan anggaran yang memadai bagi sektor pendidikan. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa “dana pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Dengan demikian, alokasi tersebut berperan strategis dalam memperbaiki infrastruktur pendidikan serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran di berbagai satuan pendidikan.

Salah satu komponen pembiayaan operasional terbesar pemerintah adalah Dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan), hasil integrasi dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesenak. Dana tersebut disalurkan langsung kepada satuan pendidikan dan dikelola secara otonom oleh kepala sekolah bersama tim manajemen. Selain berlandaskan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022, dana BOS memiliki peran strategis dalam mendukung pendanaan operasional pendidikan. Dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum ini dirancang untuk memperkuat penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, mulai pendidikan dasar hingga menengah. Dana BOS mulai digulirkan pemerintah Indonesia pada 2005 sebagai bagian dari kebijakan pendidikan gratis yang mendukung Program

Wajib Belajar Sembilan Tahun. Kebijakan tersebut dirumuskan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 dan diperjelas lebih lanjut oleh Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009.

Adapun dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) DKI Jakarta merupakan program strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang digulirkan sejak 2009 sebagai wujud komitmen pendanaan bagi satuan pendidikan negeri dan swasta, khususnya pada jenjang PAUD, SD, dan SMP. BOP tidak sekadar melengkapi Dana BOS dari pemerintah pusat, tetapi menjadi instrumen utama untuk memenuhi pembiayaan operasional dasar sekolah, antara lain biaya pembelajaran, pengadaan alat tulis, kegiatan ekstrakurikuler, dan peningkatan mutu guru. Berbeda dengan BOS yang bersifat umum, skema BOP dirancang lebih fleksibel dan proporsional karena disesuaikan dengan kebutuhan lokal serta biaya hidup di Jakarta. Dinas Pendidikan DKI Jakarta (2023) melaporkan bahwa alokasi BOP dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dan jenjang pendidikan, kemudian dievaluasi secara berkala melalui sistem pelaporan daring e-BOP. Namun, temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan *Indonesia Corruption Watch* menunjukkan masih adanya kendala akurasi pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi publik. Oleh sebab itu, penguatan transparansi dan pengawasan partisipatif menjadi prasyarat agar BOP benar-benar berfungsi sebagai sarana peningkatan akses dan mutu pendidikan di ibukota.

Dengan demikian, hingga tahun 2025, dana BOS telah berjalan selama dua dekade, sementara skema dana BOP telah berlangsung selama lima belas tahun. Kedua program ini merupakan bentuk konkret dari komitmen negara dalam menjamin pembiayaan pendidikan dasar dan menengah secara merata dan berkelanjutan. Seiring perkembangan kebijakan, kedua skema tersebut kini diintegrasikan dalam kerangka Dana BOSP yang lebih komprehensif, sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP. Integrasi ini bertujuan menyederhanakan birokrasi, meningkatkan fleksibilitas pengelolaan dana, serta memperkuat akuntabilitas pemanfaatannya di tingkat satuan pendidikan. Lestari dan Sugiharto (2022) menyatakan bahwa keberlangsungan program BOSP tidak hanya mencerminkan kesinambungan

kebijakan pendidikan, tetapi juga menjadi indikator konsistensi negara dalam membiayai pendidikan sebagai layanan publik. Namun demikian, efektivitas program ini sangat bergantung pada kualitas tata kelola, kapasitas manajerial kepala sekolah, serta mekanisme pelaporan dan pengawasan yang akuntabel. Tanpa sistem pelaporan yang transparan dan partisipatif, potensi kebocoran, inefisiensi, atau penyalahgunaan dana tetap menjadi risiko yang mengancam esensi program ini sebagai instrumen keadilan sosial dalam pendidikan.

Pada jenjang pendidikan menengah, khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP), pemanfaatan dana BOSP terus diperluas untuk berbagai keperluan operasional non-personalia, termasuk pengadaan buku pelajaran, pembiayaan kegiatan pembelajaran, pemeliharaan sarana-prasarana, dan pelatihan guru (Navisya, 2024). Dengan demikian, satuan pendidikan diharapkan mengoptimalkan dana tersebut bukan hanya untuk menutupi biaya operasional rutin, melainkan juga sebagai instrumen pengembangan mutu pendidikan secara menyeluruh.

Namun, fakta lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan dana tersebut masih jauh dari optimal. Studi Andriani & Mokhtar (2019) menemukan bahwa hanya sebagian kecil sekolah yang memublikasikan rencana maupun laporan penggunaan dana BOSP melalui papan pengumuman atau laman daring, dan banyak yang tidak melibatkan komite dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Di DKI Jakarta, audit Badan Pemeriksa Keuangan bersama Inspektorat Provinsi mengungkap keterlambatan pengiriman laporan BOSP bahkan terdapat laporan fiktif, sementara audit internal tahun 2022 mencatat tujuh belas persen sekolah tidak mengisi dokumen ARKAS sesuai ketentuan (JurnalPost 2023). Survei Indonesia Corruption Watch (2022) menambah bukti bahwa sebagian besar orang tua tidak mengetahui penggunaan dana BOSP dan tidak dapat mengakses RKAS, surat pertanggungjawaban, maupun data realisasi belanja sekolah. Pada sisi pelaporan digital, Pusat Informasi ARKAS melaporkan banyak operator gagal mengunggah Bukti Kas Umum dan RKAS karena kesalahan kode aktivasi atau proses pengesahan dinas yang tertunda tujuh sampai empat belas hari, sehingga menciptakan ruang kosong data dan menunda laporan tahap berikut. Keterbatasan teknis dan kesenjangan infrastruktur tersebut meningkatkan risiko data tidak akurat atau bahkan tidak dipublikasikan.

Sebagai langkah penguatan tata kelola, pemerintah meluncurkan platform digital ARKAS dan SIPLah, tetapi tingkat adopsinya masih belum merata. Banyak sekolah kesulitan melakukan pelaporan elektronik karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kualitas jaringan internet, dan penolakan terhadap digitalisasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang menjadi pelopor dalam digitalisasi pendidikan dan pengelolaan anggaran; meskipun demikian, laporan pelaksanaan BOSP tahun 2023 menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum diterapkan secara konsisten, terutama di sekolah yang dikelola semiotonom (GoodStats 2024). Kondisi tersebut menandakan lemahnya mekanisme transparansi pada tingkat sekolah maupun dinas pendidikan.

Transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan menuntut tersedianya informasi yang lengkap dan mudah diakses publik. Keterbukaan tersebut tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengelola sektor pendidikan (Anggraini et al., 2020). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan transparansi keuangan cenderung memperoleh tingkat kepercayaan masyarakat lebih tinggi, sehingga keterlibatan orang tua dan warga dalam berbagai aktivitas sekolah ikut meningkat.

Pada tataran kebijakan, Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dana BOSP menetapkan empat prinsip tata kelola, yakni efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Satuan pendidikan wajib mematuhi regulasi ini karena transparansi yang menjadi elemen kunci, tentu berhubungan langsung dengan hak publik untuk mengakses informasi anggaran sekolah.

Penerapan transparansi pembiayaan pendidikan dapat dijelaskan melalui dua kerangka *grand theory*, yakni *Agency Theory* dan *Stakeholder Theory*. *Agency Theory* memandang relasi antara pemerintah atau masyarakat sebagai pemberi mandat (*principal*) dengan pihak sekolah sebagai pelaksana (*agent*) berpotensi menimbulkan biaya keagenan ketika informasi keuangan tidak terbuka. Transparansi berfungsi menekan biaya tersebut dengan menyediakan mekanisme pemantauan sekaligus mendorong perilaku akuntabel (Jensen & Meckling, 1976). Sementara itu, *Stakeholder Theory* mengakui hak pemangku kepentingan berbagai

pihak seperti orang tua, siswa, guru, serta masyarakat luas untuk mengakses informasi keuangan sekolah. Keterbukaan mendorong dukungan publik dan menciptakan legitimasi sosial lembaga pendidikan (Freeman, 1984).

Dalam ranah *middle-range theory*, model *Education Financial Management Cycle* menempatkan transparansi pada setiap tahapan manajemen biaya, mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi. Apabila salah satu tahapan, terutama pelaporan tidak terbuka, maka umpan balik bukti hilang dan perbaikan mutu sulit dilakukan (Levacic, 2020). Integrasi ketiga perspektif tersebut menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis yang menekan biaya keagenan, memperkuat legitimasi pemangku kepentingan, serta memastikan siklus pengelolaan keuangan pendidikan berjalan berbasis bukti. Kerangka ini selanjutnya digunakan untuk menganalisis empat indikator transparansi yakni ketersediaan informasi, partisipasi publik, aksesibilitas data, dan pelaporan berkala, sekaligus menjelaskan mengapa kelemahan pada satu indikator dapat menimbulkan efek domino terhadap efektivitas pembiayaan pendidikan.

Secara konseptual, transparansi pembiayaan pendidikan dipetakan ke dalam empat indikator utama, yaitu ketersediaan informasi, aksesibilitas data, keterlibatan publik, dan pelaporan berkala (Mulyasa, 2021). Keempat indikator ini menjadi tolok ukur transparansi keuangan sekolah sekaligus dasar evaluasi kebijakan pendanaan.

Permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya berpangkal pada lemahnya pemenuhan keempat indikator transparansi tersebut. Ketersediaan informasi yang terbatas, akses data yang sulit, minimnya keterlibatan publik, serta pelaporan yang tidak tepat waktu menjadikan dana BOSP rentan diselewengkan. Ketika satu indikator rapuh seperti akses publik yang terbatas, maka indikator lain seperti pengadaan dan pelaporan ikut melemah. Bukti audit dan survei menunjukkan bahwa ketidakterbukaan bukan sekadar isu administratif, melainkan berdampak langsung pada hilangnya nilai manfaat dana pendidikan bagi peserta didik; karena itu, penguatan transparansi di semua indikator perlu ditempuh secara sistemik.

Indikator ketersediaan informasi menuntut lembaga pendidikan menyediakan data yang jelas, akurat, dan terpercaya mengenai penggunaan

anggaran (Maimunah & Elgina, 2023). Sementara itu, keterlibatan publik bukan sekadar pelengkap, melainkan pilar utama transparansi yang terdiri dari partisipasi komite, orang tua, dan masyarakat dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, pelaporan dana BOSP, serta evaluasi program memastikan proses pengambilan keputusan lebih terbuka, demokratis, dan bebas konflik kepentingan (Mulyasa, 2021).

Indikator aksesibilitas mengukur kemampuan masyarakat memperoleh dan memahami informasi penggunaan dana pendidikan, sehingga dapat memberikan umpan balik konstruktif kepada satuan pendidikan (Susanto, 2023). Keterbukaan laporan keuangan melengkapi indikator ini, karena laporan yang komprehensif mendorong pemerintah, masyarakat, dan yayasan memantau dana secara lebih efektif (Kornitasari, 2023).

Integrasi keempat indikator transparansi diharapkan membuat pengelolaan pembiayaan pendidikan di Indonesia lebih efektif dan akuntabel. Keterbukaan tersebut tidak hanya memelihara kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi fondasi kokoh bagi peningkatan mutu pendidikan di masa depan. Jika prinsip transparansi diterapkan secara konsisten, sistem pendidikan akan bergerak ke arah yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.

Jakarta Timur merupakan salah satu wilayah pendidikan dengan jumlah sekolah negeri yang tinggi dan heterogen secara sosial ekonomi. SMP Negeri 103 Jakarta sebagai salah satu sekolah di wilayah tersebut, menyelenggarakan pendidikan berbasis Kurikulum Merdeka dan melaksanakan sistem pembelajaran lima hari (*full day school*). Dalam hal infrastruktur, SMPN 103 Jakarta memiliki 28 ruang kelas, 3 laboratorium, 1 perpustakaan, dan 12 fasilitas sanitasi siswa yang tergolong dalam kondisi baik, rusak ringan, atau sedang. Sekolah ini menggunakan daya listrik sebesar 64.000 Watt dari PLN, dan saat ini memiliki akses internet yang menjadi catatan penting dalam mendukung pembelajaran digital di era Kurikulum Merdeka.

Dalam era desentralisasi pendidikan dan penerapan Kurikulum Merdeka, sekolah memiliki otonomi lebih besar dalam pengelolaan dana BOSP. Dengan lebih dari 900 siswa dan mengelola 28 rombongan belajar, sekolah ini menawarkan konteks kompleks dalam pengelolaan keuangan berbasis Bantuan Operasional

Satuan Pendidikan (BOSP). Kompleksitas ini menjadi peluang riset untuk melihat bagaimana prinsip *good governance* dijalankan pada tingkat satuan pendidikan.

Walaupun profil akademik dan prestasi SMPN 103 Jakarta terbilang cukup tinggi, hingga kini belum ada kajian yang secara khusus meneliti transparansi pembiayaan sekolah tersebut. Penelusuran di basis data ilmiah Garuda, Neliti, dan SINTA menunjukkan bahwa penelitian tentang SMPN 103 Jakarta umumnya berfokus pada prestasi siswa, proses seleksi, atau penguatan kurikulum STEM, sementara tata kelola keuangannya belum tersentuh secara spesifik.

Transparansi pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 103 Jakarta, jika ditinjau dari indikator ketersediaan informasi, aksesibilitas, keterlibatan publik, dan pelaporan keuangan, menunjukkan potensi yang relevan untuk dikaji lebih dalam melalui penelitian akademik. Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan, sudah adanya laporan keuangan yang ditempelkan secara terbuka. Pencantuman dokumen laporan keuangan di area strategis sekolah memperlihatkan komitmen keterbukaan institusi dalam menampilkan kondisi anggaran kepada warga sekolah tanpa perlu prosedur akses yang rumit. Keterbukaan semacam ini memperkuat indikator ketersediaan informasi serta menghapus sekat birokratis dalam memperoleh data keuangan, terutama bagi kalangan siswa dan guru yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dana. Hal ini menunjukkan bahwa indikator ketersediaan informasi sudah terpenuhi secara optimal, terutama dalam konteks keterbukaan publik sebagaimana diamanatkan oleh Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS.

Adapun ditinjau dari ranah aksesibilitas, ditemukan sistem pengarsipan digital terbuka bagi guru dan tenaga kependidikan. Digitalisasi laporan keuangan yang dapat diakses oleh internal sekolah menunjukkan sistem tata kelola berbasis transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks pelaporan pembiayaan pendidikan, pengarsipan digital memudahkan proses audit internal dan evaluasi oleh para pemangku kepentingan, serta mencegah terjadinya manipulasi data keuangan melalui jejak digital yang dapat ditelusuri.

Dari sisi keterlibatan publik, menunjukkan cukup adanya forum rutin orang tua dan komite yang memuat transparansi keuangan. Praktik ini menunjukkan adanya ruang deliberatif antara pihak sekolah dan perwakilan orang tua siswa dalam

mendiskusikan agenda keuangan. Dalam perspektif subfokus keterlibatan publik, forum semacam ini menjadi media strategis untuk menyampaikan informasi, menyerap aspirasi, serta mengklarifikasi pertanyaan publik terhadap pengelolaan dana pendidikan. Forum ini sekaligus menjembatani prinsip partisipasi aktif dan kontrol sosial terhadap belanja pendidikan di tingkat satuan.

Dalam hal pelaporan keuangan, sudah ditemukan bukti adanya laporan semesteran atau tahunan yang dipublikasikan secara daring maupun luring di lingkungan sekolah. Kondisi ini menunjukkan tidak adanya celah transparansi yang sejalan dengan pengelolaan anggaran telah mengikuti regulasi. Dengan alokasi dana besar dan otonomi manajerial luas, sekolah ini layak menjadi rujukan praktik terbaik dalam transparansi pembiayaan pendidikan. Namun, tanpa studi mendalam, belum tersedia bukti empiris yang memastikan bahwa penerapan transparansi telah selaras dengan prinsip *good governance*. Penelitian lapangan dapat mengungkap kendala implementasi, kapasitas manajerial, serta pemahaman pemangku kepentingan terhadap kewajiban transparansi dan akuntabilitas.

Sementara itu, dari berbagai aspek lainnya juga ditemukan potensi transparansi yang terwujud, yaitu pelibatan siswa dalam bentuk simulasi proyek keuangan melalui kegiatan pembiasaan, untuk menumbuhkan kesadaran sejak dini terhadap pentingnya transparansi publik. Hal ini tidak hanya menyasar aspek pedagogis, namun juga menyentuh subfokus keterlibatan publik, karena siswa diposisikan sebagai bagian dari warga sekolah yang memiliki hak untuk mengetahui dan memahami bagaimana dana sekolah dialokasikan demi kepentingan bersama. Strategi ini tidak hanya mendukung pendidikan karakter dan kewarganegaraan, namun juga menyentuh aspek pelaporan yang berbasis partisipasi. Kegiatan ini melatih siswa memahami peran fiskal dalam kehidupan publik dan menciptakan generasi yang lebih kritis terhadap penggunaan dana publik di masa depan.

Tak kalah penting, SMPN 103 Jakarta juga membentuk tim internal monitoring keuangan dari guru lintas mata pelajaran. Tim pengawas internal dari berbagai bidang studi memperkuat kontrol horizontal (*peer review*) terhadap pembelanjaan sekolah. Dalam ranah pelaporan, ini meningkatkan objektivitas evaluasi penggunaan anggaran, serta menjadi instrumen kolektif untuk menjaga

integritas dan efektivitas belanja pendidikan berdasarkan prioritas program pembelajaran.

Adapun hal esensial yang ditemukan di sekolah ini yaitu ibu Sri Muryani, M.Pd. Selaku kepala SMPN 103 Jakarta menyusun evaluasi efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengaitkan pembiayaan dengan capaian hasil belajar, menekankan transparansi berbasis hasil (*outcome-oriented accountability*). Dalam subfokus pelaporan, pendekatan ini menghindari pelaporan yang sekadar administratif, dan justru memperkuat argumen bahwa keuangan sekolah harus berkontribusi langsung terhadap mutu pembelajaran.

Penelitian ini menunjukkan transparansi anggaran sekolah sudah sepenuhnya terealisasi secara optimal. Melalui empat indikator utama antara lain ketersediaan informasi, keterlibatan publik, aksesibilitas, dan publikasi laporan keuangan, penelitian ini bertujuan mengkaji sejauh mana prinsip *good governance* diterapkan di tingkat sekolah. Ketersediaan informasi menilai sejauh mana dokumen keuangan seperti Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta laporan realisasi tersedia bagi publik. Keterlibatan publik menyoroti peran serta komite sekolah dan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran. Aksesibilitas mengkaji kemudahan warga sekolah dalam memperoleh informasi. Sedangkan pelaporan meninjau keberlanjutan keterbukaan melalui berbagai *dashboard* pelaporan seperti sistem ARKAS, ERKAS, dan SIAP BOS/BOP.

Berdasarkan analisis terhadap keempat indikator tersebut, SMPN 103 Jakarta sangat layak dijadikan lokasi penelitian. Optimalnya transparansi membuat publik bebas menilai apakah alokasi dana benar-benar menjawab kebutuhan peserta didik, mulai dari pengadaan sumber belajar sampai pengembangan kompetensi guru. Kuatnya transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, menambah partisipasi komite sekolah, dan pada akhirnya mensejahterakan mutu pendidikan. Dengan demikian mengkaji tingkat, mekanisme, dan determinan transparansi pembiayaan di SMPN 103 Jakarta menjadi panutan untuk memecahkan paradoks dana besar tetapi hasil terbatas serta merumuskan model praktik baik bagi sekolah negeri di kawasan perkotaan.

Selain memberikan kontribusi akademik dalam pemetaan kondisi nyata implementasi tata kelola keuangan sekolah, penelitian ini juga dapat membantu

pihak sekolah dan Dinas Pendidikan dalam menerapkan prinsip transparansi. Sejalan dengan temuan Sa'adah (2024) dan Rusdiyanti (2024) yang menunjukkan bahwa transparansi keuangan sekolah berkorelasi kuat dengan akuntabilitas dan kinerja sekolah secara menyeluruh, maka penelitian ini bukan hanya penting, tetapi juga memiliki urgensi praktis dan sosial yang tinggi.

Merujuk uraian latar belakang tersebut, maka peneliti menetapkan judul penelitian **Transparansi Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus di SMPN 103 Jakarta)** untuk memetakan praktik transparansi, menguji empat indikator kunci (ketersediaan informasi, aksesibilitas, partisipasi publik, dan pelaporan), serta menyediakan bukti bagi perbaikan kebijakan di tingkat sekolah dan pemerintah daerah. Adapun penelitian ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga kontekstual dengan kebutuhan aktual dalam sistem manajemen pendidikan nasional.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah transparansi pembiayaan pendidikan di SMPN 103 Jakarta. Berdasarkan fokus penelitian maka sub fokus penelitian ini adalah:

1. Ketersediaan informasi pembiayaan pendidikan di SMPN 103 Jakarta
2. Aksesibilitas informasi pembiayaan Pendidikan di SMPN 103 Jakarta
3. Keterlibatan publik dalam pembiayaan pendidikan di SMPN 103 Jakarta
4. Pelaporan pembiayaan pendidikan di SMPN 103 Jakarta

C. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketersediaan informasi pembiayaan pendidikan di SMPN 103 Jakarta?
2. Bagaimana aksesibilitas informasi pembiayaan pendidikan di SMPN 103 Jakarta?
3. Bagaimana keterlibatan publik dalam pembiayaan pendidikan di SMPN 103 Jakarta?
4. Bagaimana pelaporan pembiayaan pendidikan di SMPN 103 Jakarta?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan tentang ketersediaan informasi pembiayaan pendidikan di SMPN 103 Jakarta
2. Menggambarkan tentang aksesibilitas informasi dalam pembiayaan pendidikan di SMPN 103 Jakarta
3. Menggambarkan tentang keterlibatan publik dalam pembiayaan pendidikan di SMPN 103 Jakarta
4. Menggambarkan tentang pelaporan pembiayaan pendidikan di SMPN 103 Jakarta

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan terkait dengan transparansi pembiayaan pendidikan sehingga mampu menjadi sekolah yang akuntabel.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi lembaga pendidikan dan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan hasil penelitian ini dalam rangka untuk melaksanakan transparansi pembiayaan di lembaga pendidikan masing-masing.

F. Kebaruan Penelitian

Beberapa penelitian mengenai transparansi pembiayaan pendidikan telah dilakukan di Jakarta dan sekitarnya, dan temuan-temuan tersebut menjadi landasan awal bagi riset ini yang berjudul **Transparansi Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus di SMPN 103 Jakarta)**. Meskipun menyoroti isu serupa, masing-masing studi memiliki fokus dan metode yang berbeda. Peninjauan kritis terhadap karya-

karya tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi kekosongan literatur sekaligus menegaskan kebaruan serta kontribusi penelitian ini.

Mukodas (2025) mengevaluasi implementasi pengelolaan Dana BOS pada SMA negeri di DKI Jakarta dengan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Penelitian tersebut menyoroti efektivitas, efisiensi, dan kendala pelaksanaan; hasilnya menunjukkan bahwa perencanaan sudah baik, tetapi pelaksanaan belum optimal karena hambatan teknis dan manajerial. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan kapasitas tim pengelola serta pembaruan sistem digital BOS untuk meningkatkan efisiensi. Temuan ini bermanfaat sebagai dasar penyempurnaan kebijakan BOS secara nasional. Namun, studi tersebut tidak menelaah dimensi transparansi penggunaan anggaran secara mendalam, sehingga belum menyediakan kerangka evaluasi dan mekanisme pengawasan yang sistematis sebagai celah yang ingin diisi oleh penelitian pada SMPN 103 Jakarta.

Penelitian lain yang memperluas pemahaman tentang manajemen keuangan dilakukan oleh Maghfiroh (2024), yang menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menelaah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana BOS di SMAN 8 Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan keuangan sudah tersedia dan akuntabilitas tergolong baik, tetapi transparansi kepada publik masih belum optimal. Sekolah perlu memperkuat strategi komunikasi informasi dan meningkatkan pelibatan komite agar kontrol sosial terhadap dana BOS lebih efektif. Meskipun studi ini memberi wawasan tentang praktik transparansi di sekolah reguler, penelitian belum menyentuh praktik transparansi ditinjau dari empat indikator pada sekolah berotonomi tinggi seperti SMPN 103 Jakarta, sehingga terdapat celah yang layak dijelajahi lebih lanjut.

Selanjutnya, Artini (2024) meneliti pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan waktu terhadap efektivitas pengelolaan Dana BOS, dengan partisipasi komite sekolah sebagai variabel moderator. Penelitian kuantitatif ini melibatkan dua belas SMA dan SMK negeri di Kabupaten Jember dan dianalisis menggunakan pendekatan Partial Least Squares. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga variabel utama berpengaruh signifikan terhadap efektivitas, sedangkan keterlibatan komite memperkuat hubungan tersebut. Rekomendasi peneliti menekankan pentingnya pelibatan aktif komite dan pemangku kepentingan lain

dalam tata kelola keuangan sekolah. Namun, studi ini belum menelaah aspek teknologi pelaporan, khususnya penerapan e-RKAS sehingga belum dapat menjawab kebutuhan sekolah negeri berotonomi tinggi seperti SMPN 103 Jakarta yang memiliki kompleksitas keuangan.

Dalam perspektif yang lebih luas, penelitian yang dilakukan oleh Apriansi (2023) menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS di SMAN 12 Makassar selama tiga tahun terakhir dengan metode kualitatif deskriptif. Temuannya menunjukkan bahwa praktik keterbukaan dan pertanggungjawaban terus meningkat, tetapi penelitian tersebut belum menelaah dampak transparansi terhadap kinerja keuangan sekolah secara menyeluruh. Berbeda dari pendekatan itu, studi pada SMPN 103 Jakarta akan menilai hubungan antara penerapan teknologi pelaporan keuangan dan tingkat ketersediaan serta aksesibilitas informasi pembiayaan, sehingga memberikan perspektif yang lebih luas mengenai pengaruh digitalisasi terhadap transparansi pembiayaan pendidikan.

Begitu pula penelitian selanjutnya oleh Kusumastuti (2023), yang meneliti keterkaitan transparansi dan akuntabilitas dengan pengelolaan Dana BOS di SMAN 7 Merangin. Hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas tata kelola keuangan sekolah, sehingga semakin tinggi akuntabilitas, semakin baik pula pengelolaan dana BOS. Temuan ini membuka ruang riset lanjutan di SMPN 103 Jakarta untuk menelaah bukan hanya tingkat transparansi, melainkan juga bagaimana ketersediaan informasi, keterlibatan publik, kemudahan akses data, serta sistem pelaporan digital berkontribusi pada tata kelola keuangan sekolah berotonom tinggi.

Penelitian Agung Ridwansyah (2025) menelaah keterkaitan antara transparansi pembiayaan pendidikan dan kepuasan orang tua di SMA Islam Terpadu Thariq Bin Ziyad melalui pendekatan kuantitatif korelasional, sehingga menghasilkan temuan statistik tentang tingkat transparansi, tingkat kepuasan, dan kekuatan hubungan keduanya. Jika dibandingkan, penelitian di SMPN 103 Jakarta menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif yang memberikan gambaran lebih mendalam mengenai praktik transparansi, alur informasi, dinamika komunikasi, serta pengalaman langsung pemangku kepentingan dalam proses pembiayaan pendidikan. Penelitian Agung berfokus pada pengukuran hubungan variabel dan

hasil kuantitatif yang terstandar, sementara penelitian di SMPN 103 Jakarta menekankan analisis proses, konteks, hambatan struktural, dan pola implementasi prinsip transparansi di tingkat operasional sekolah. Selain itu, penelitian di SMPN 103 Jakarta menawarkan kontribusi konseptual berupa pemetaan mekanisme keterbukaan informasi yang belum efektif, termasuk kualitas respons sekolah, aksesibilitas dokumen, serta peran budaya organisasi dalam membentuk perilaku transparansi. Dengan demikian, kedua penelitian membahas transparansi pembiayaan pendidikan, tetapi penelitian di SMPN 103 Jakarta memberikan originalitas pada kedalaman analisis proses dan realitas lapangan yang tidak ditangkap oleh pendekatan kuantitatif dalam penelitian Agung.

Penelitian Melissa Nathania Simanjuntak (2024) berfokus pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di UPTD SPF SD Negeri Mintaragen 5 melalui pendekatan kualitatif yang menekankan keterbukaan laporan keuangan, mekanisme pengawasan internal, dan penyampaian informasi kepada publik. Jika dibandingkan, penelitian tentang transparansi pembiayaan pendidikan di SMPN 103 Jakarta memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya menilai kepatuhan administratif terhadap pengelolaan dana, tetapi juga menelaah ketersediaan informasi, aksesibilitas bagi pemangku kepentingan, kualitas pelibatan publik, dan efektivitas sistem pelaporan keuangan sekolah. Penelitian Melissa lebih terarah pada aspek teknis BOS, sementara studi di SMPN 103 Jakarta menempatkan transparansi sebagai bagian dari tata kelola sekolah yang berdampak pada budaya akuntabilitas dan kepercayaan. Selain itu, studi di SMPN 103 Jakarta menyoroti integrasi sistem digital dan dinamika partisipasi yang belum optimal, sehingga menawarkan analisis yang lebih struktural dan kontekstual. Dengan demikian, keduanya memiliki fokus serupa pada transparansi, tetapi penelitian di SMPN 103 Jakarta memberikan kontribusi original berupa perluasan isu menuju penguatan *governance* dan pola komunikasi publik di sekolah.

Penelitian Kunto Gemilang Sakti (2022) berfokus pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 3 Bogor melalui studi kasus eksploratif yang menggambarkan fenomena secara apa adanya tanpa menguji hipotesis. Temuan utamanya menunjukkan bahwa sekolah telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan sangat baik, ditandai adanya RKAS

yang sesuai juknis, kesesuaian realisasi anggaran dengan standar penggunaan, serta pelaporan yang tertib. Jika dibandingkan, penelitian di SMPN 103 Jakarta memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya menilai kepatuhan terhadap BOS, tetapi menelaah praktik transparansi pembiayaan pendidikan secara menyeluruh, termasuk akses informasi, komunikasi publik, dan pengalaman pemangku kepentingan dalam memahami alur pembiayaan. Penelitian Kunto lebih menitikberatkan pada aspek kepatuhan terhadap aturan teknis BOS, sedangkan penelitian di SMPN 103 Jakarta menyoroti dinamika transparansi sebagai bagian dari tata kelola sekolah dan interaksi sosial antara sekolah dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian di SMPN 103 Jakarta menghadirkan originalitas melalui pendalaman konteks, pemetaan hambatan lapangan, serta analisis kualitas transparansi yang tidak hanya berbasis dokumen, tetapi juga berbasis pengalaman pengguna layanan pendidikan.

Penelitian Meidikia Dora Diaresta (2020) menelaah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SMP BOPKRI 3 Yogyakarta dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, dan hasilnya menunjukkan bahwa sekolah telah menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas serta transparansi sesuai juknis yang berlaku. Fokus utamanya terletak pada keteraturan perencanaan, pelaksanaan, pembukuan, pelaporan, dan keterbukaan informasi penggunaan dana BOS. Berbeda dari itu, penelitian tentang transparansi pembiayaan pendidikan di SMPN 103 Jakarta memperluas cakupan objek dan analisisnya, tidak hanya menilai aspek akuntabilitas teknis BOS, tetapi juga menelusuri pola keterbukaan seluruh skema pembiayaan pendidikan, relasi antarpemangku kepentingan, serta dinamika praktik transparansi dalam konteks organisasi sekolah. Penelitian ini juga menggali pengalaman, persepsi, dan praktik keseharian aktor sekolah jauh lebih dalam melalui pendekatan studi kasus yang mendeskripsikan proses, kendala, dan standar transparansi secara komprehensif. Dengan demikian, penelitian Meidikia berfokus pada kepatuhan terhadap juknis BOS, sedangkan penelitian ini menyoroti transparansi pembiayaan secara lebih luas, mendalam, dan kontekstual pada satuan pendidikan negeri.

Penelitian Rulya Ryanti (2023) menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS merupakan amanat langsung Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menuntut pembukuan dan pelaporan keuangan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Melalui pendekatan studi kasus di SD Negeri 01 Sawahan, penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan guru, staf, dan komite sekolah dalam penyusunan anggaran serta keterbukaan laporan pertanggungjawaban di ruang publik sekolah menjadi indikator penting terpenuhinya prinsip transparansi, diperkuat dengan adanya audit independen dari dinas terkait. Hasil penelitian sebelumnya oleh Safratunnisa yang turut dibandingkan dalam studi tersebut juga menegaskan urgensi partisipasi masyarakat dan komite sekolah dalam proses pengambilan keputusan anggaran. Jika dibandingkan, penelitian tentang transparansi pembiayaan pendidikan di SMPN 103 Jakarta tidak hanya memotret keterbukaan penggunaan dana BOS, tetapi memperluas cakupan pada keseluruhan praktik transparansi pembiayaan sekolah, termasuk pola komunikasi, mekanisme pengawasan, serta dinamika relasi antarpemangku kepentingan. Penelitian ini juga menggali pengalaman empiris para aktor sekolah secara lebih mendalam, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana transparansi beroperasi dalam konteks satuan pendidikan negeri. Dengan demikian, studi Rulya berfokus pada pemenuhan indikator transparansi BOS, sedangkan penelitian ini menelaah transparansi pembiayaan secara lebih luas, struktural, dan kontekstual.

Berikut adalah tabel perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian berjudul **Transparansi Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus di SMPN 103 Jakarta)**:

Tabel 1.1 Kebaruan Penelitian

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian (berfokus pada penelitian lawan)	Originalitas Penelitian
1	Ali Mukodas (2025) Evaluasi Implementasi	1. Menekankan pentingnya evaluasi pengelolaan keuangan sekolah dengan acuan	1. Mengevaluasi implementasi pengelolaan dana	1. Spesifik pada sekolah otonom 2. Fokus pada prinsip

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian (berfokus pada penelitian lawan)	Originalitas Penelitian
	Pengelolaan Dana BOS SMA Negeri DKI Jakarta	<p>pada prinsip-prinsip <i>good governance</i>, khususnya transparansi dan akuntabilitas</p> <p>2. Menggunakan pendekatan manajemen pembiayaan pendidikan sebagai kerangka analisis</p> <p>3. Merujuk pada regulasi seperti Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 dan sistem pelaporan seperti ARKAS dan SIPLah</p>	<p>BOS secara umum pada beberapa SMA Negeri di DKI Jakarta</p> <p>2. Fokus pada implementasi teknis BOS (perencanaan, penggunaan, pelaporan)</p> <p>3. Cenderung kuantitatif atau evaluatif umum berbasis indikator keberhasilan implementasi</p> <p>4. Mencakup seluruh atau beberapa SMA Negeri di Jakarta</p> <p>5. Tidak menyoroti keterbukaan informasi publik atau aksesibilitas</p>	<p>transparansi secara holistik</p> <p>3. Studi kasus mendalam pada 1 lembaga</p> <p>4. Mengisi celah literatur</p>
2	Zakiyatul Maghfiroh (2024)	1. Meneliti pengelolaan Dana	1. Transparansi & akuntabilitas → bersifat dua	1. Objek berotonomi tinggi dalam

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian (berfokus pada penelitian lawan)	Originalitas Penelitian
	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 8 Kota Kediri	<p>BOS di sekolah menengah negeri</p> <p>2. Terdapat prinsip transparansi untuk dikaji</p> <p>3. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis</p>	<p>variabel 2.</p> <p>Cenderung evaluatif → seberapa akuntabel dan transparan laporan BOS</p> <p>3. Jenjang sekolah sebagai lokasi yang diteliti</p>	<p>pengelolaan dana BOS</p> <p>2. Fokus Eksklusif dan Mendalam</p> <p>3. Mengisi Celah Penelitian</p> <p>4. Studi ini dilakukan di wilayah perkotaan ibu kota (Jakarta Timur) pada jenjang SMP</p> <p>5. Mengutamakan pendekatan studi kasus kualitatif untuk mengungkap praktik transparansi digital dan partisipasi publik secara nyata</p>
3	Ni Ketut Yuli Artini (2024)	1. Membahas pengelolaan Dana BOS dan prinsip	1. Kuantitatif dengan pendekatan	1. Studi mendalam pada sekolah khusus

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian (berfokus pada penelitian lawan)	Originalitas Penelitian
	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Ketepatan Waktu terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS dengan Partisipasi Komite sebagai Variabel Moderasi	<p>transparansi sebagai komponen penting dalam sistem pembiayaan pendidikan</p> <p>2. Menggunakan kerangka manajemen pembiayaan pendidikan serta prinsip-prinsip <i>good governance</i> (transparansi, akuntabilitas, partisipasi)</p> <p>3. Mengacu pada kebijakan nasional, seperti Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022, yang mewajibkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana BOSP</p> <p>4. Memberikan sumbangan pemikiran untuk perbaikan</p>	<p>analisis regresi dan uji moderasi</p> <p>2. Banyak variabel</p> <p>3. Tidak disebutkan secara spesifik sekolah yang diteliti (kemungkinan multi-sekolah)</p> <p>4. Mencari pengaruh statistik antar variabel</p> <p>5. Fokusnya pada hubungan statistik, bukan praktik</p>	<p>2. Fokus pada prinsip transparansi sebagai nilai tata kelola</p> <p>3. Mengisi celah kajian praktik transparansi di sekolah</p> <p>4. Kualitatif dengan pendekatan studi kasus</p>

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian (berfokus pada penelitian lawan)	Originalitas Penelitian
		pengelolaan keuangan di tingkat sekolah		
4	Apriansi (2023) Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMAN 12 Makassar	1. Memiliki fokus serupa untuk memahami efek dari transparansi dan akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS dalam konteks pendidikan yang ditujukan bagi lembaga sekolah	1. Menekankan lebih pada aspek kualitatif dari persepsi dan responden 2. Lokasi penelitian yang berbeda yang dapat berpengaruh terhadap hasil, terutama dalam hal kebijakan dan praktik lokal yang berbeda dalam pengelolaan dana 3. Menawarkan nuansa kontekstual yang berbeda berdasarkan lokasi 4. Kontribusi pada pemetaan prinsip tata kelola BOS reguler 5. Menggunakan metode	1. Mengamati keunikan pengelolaan di sekolah negeri di Jakarta 2. Menyoroti faktor-faktor yang mungkin berbeda dibandingkan dengan sekolah lain 3. Menciptakan tambahan perspektif terhadap isu yang sering menjadi perhatian dalam pengelolaan dana publik 4. Penelitian difokuskan pada keterbukaan keuangan berbasis indikator

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian (berfokus pada penelitian lawan)	Originalitas Penelitian
			dokumentasi dan kuisioner guru untuk mengevaluasi akuntabilitas internal	publik dan partisipatif 5. Mengisi kekosongan kajian tentang aksesibilitas informasi keuangan sekolah melalui media digital dan peran serta warga sekolah di Jakarta
5	Ratih Kusumastuti (2023) Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMAN 7	1. Menjadikan transparansi sebagai fokus penelitian 2. Mengedepankan pentingnya transparansi sebagai kunci untuk memastikan penggunaan dana yang efisien dan efektif 3. Mengkaji aspek transparansi dan akuntabilitas dana BOS dengan	1. Analisis kurang mendalam tentang sub fokus dari transparansi yang diteliti 2. Sampel yang mungkin tidak mencakup seluruh populasi sekolah di Jakarta, sehingga tidak dapat digeneralisasi di tingkat nasional	1. Menghadirkan dampak yang lebih besar dari pengelolaan dana BOS terhadap kualitas pendidikan melalui analisis mendalam terhadap transparansi 2. Mengevaluasi pengelolaan dana yang tidak hanya

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian (berfokus pada penelitian lawan)	Originalitas Penelitian
	Merangin Tahun 2021	melibatkan aktor sekolah (kepala sekolah, bendahara)	<p>3. Penelitian dilakukan di daerah rural dengan keterbatasan fasilitas teknologi dan akses data</p> <p>4. Teknik analisis bersifat deskriptif sederhana tanpa eksplorasi variabel aksesibilitas publik atau kanal digital</p>	<p>berfokus pada transparansi, tetapi juga pada <i>outcome</i> yang dihasilkan</p> <p>3. Penelitian ini berbasis urban digital education dengan sorotan pada keterbukaan laporan keuangan daring, keterlibatan masyarakat, dan praktik informasi berbasis sistem digital sekolah seperti ARKAS dan SIPLah</p>
6	Agung Ridwansyah (2025) Hubungan Transparansi Pembiayaan Pendidikan dengan	1. Meneliti dampak atau implikasi transparansi bagi pemangku kepentingan	<p>1. Kuantitatif korelasional, fokus pada hubungan statistik antara variabel</p> <p>2. Hanya dua variabel yang</p>	1. Menggunakan kerangka transparansi yang lebih komprehensif daripada sekadar dua variable

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian (berfokus pada penelitian lawan)	Originalitas Penelitian
	Kepuasan Orang Tua terhadap Pelayanan Pendidikan (Penelitian di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Thariq Bin Ziyad Kabupaten Bekasi)		<p>diukur dan dikorelasikan</p> <p>3. Tujuan dan objek penelitian yang berbeda</p> <p>4. Pada dimensi partisipasi publik, lebih menitikberatkan orang tua sebagai pengguna layanan</p> <p>5. Tidak membahas sistem digital, fokus pada persepsi responden terhadap transparansi</p> <p>6. Lebih menilai <i>outcome</i> dan hubungan antarvariabel</p>	<p>2. Analisis kualitatif mendalam pada proses tata kelola sekolah</p> <p>3. Mengangkat peran teknologi digital dalam transparansi pendidikan</p> <p>4. Mengkaji partisipasi publik secara institusional, bukan sekadar persepsi</p> <p>5. Menyajikan perspektif tata kelola pendidikan yang lebih sistemik dan holistik</p> <p>6. Memberikan kontribusi ilmiah tentang budaya transparansi dan akuntabilitas</p>

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian (berfokus pada penelitian lawan)	Originalitas Penelitian
7	Melissa Nathania Simanjuntak (2024) Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Penggunaan Anggaran Dana BOS di UPTD SPF SD Negeri Mintaragen	1. Fokus pada Transparansi keuangan pendidikan 2. Menggunakan pendekatan kualitatif 3. Analisis data menggunakan model miles-huberman 4. Substansi pada praktik keterbukaan	1. Objek penelitian berbeda 2. Hanya berfokus pada transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS 3. Menekankan triangulasi sumber dan mekanisme pengawasan internal BOS 4. Tidak menyinggung aspek digital secara mendalam 5. Menyebut keterlibatan publik lebih pada transparansi kepada wali murid dan komite, tetapi tidak membahas mekanisme partisipatif secara struktural	1. Model transparansi yang lebih luas sehingga lebih sistemik dan holistik 2. Pemanfaatan teknologi digital sebagai indikator transparansi modern 3. Kerangka empiris empat subfokus transparansi 4. Fokus pada budaya kelembagaan dan kepercayaan publik sehingga memberikan kontribusi ilmiah yang lebih mendalam dibanding sekadar menilai

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian (berfokus pada penelitian lawan)	Originalitas Penelitian
			<p>6. Tantangan lebih bersifat teknis: perlunya peningkatan pengawasan dan kapasitas manajemen keuangan</p> <p>7. Mengutamakan rekomendasi administratif (penguatan manajemen, pengawasan, komunikasi)</p>	<p>kepatuhan regulasi</p> <p>5. Studi kasus dengan Evaluasi kualitatif yang lebih menyeluruh</p> <p>Sehingga memberikan konteks empiris yang lebih kaya</p> <p>6. Membuka ruang strategi penguatan transparansi berbasis naratif dan visual</p>
8	Kunto Gemilang Sakti (2022) Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan	<p>1. Meneliti transparansi dalam pengelolaan keuangan pendidikan</p> <p>2. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus</p>	<p>1. Hanya fokus pada kepatuhan BOS berdasarkan Juknis</p> <p>2. Berangkat dari fenomena penyalahgunaan dana BOS</p>	<p>1. Mengembangkan model transparansi multi-dimensi yaitu seluruh struktur pembiayaan pendidikan.</p>

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian (berfokus pada penelitian lawan)	Originalitas Penelitian
	Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Studi Kasus Pada SMP Negeri 3 Bogor)	3. Memeriksa peran pemangku kepentingan sekolah 4. Meenilai kesesuaian praktik sekolah dengan kebijakan pemerintah	3. Unit analisis yang berbeda 4. Ruang lingkup hanya pada dana BOS 5. Tidak menyinggung aspek digitalisasi transparansi 6.	2. Mengintegrasikan dimensi digitalisasi sebagai aspek transparansi modern 3. Penekanan pada partisipasi publik dan kultur akuntabilitas 4. Menyoroti gap antar-dimensi transparansi yang tidak hanya struktural tetapi juga kultural, sehingga menawarkan kontribusi teoritis baru pada literatur manajemen pendidikan 5. Menghasilkan temuan yang bersifat

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian (berfokus pada penelitian lawan)	Originalitas Penelitian
				transformatif, bukan sekadar deskriptif
9	Meidikia Dora Diaresta (2020) Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana BOS Studi Kasus SMP BOPKRI 3 Yogyakarta	1. Meneliti akuntabilitas dan transparansi dana BOS 2. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif 3. Narasumber utama berasal dari unsur manajemen sekolah (kepala sekolah dan bendahara) 4. Berorientasi pada kesesuaian dengan juknis BOS	1. Hanya menilai apakah akuntabilitas dan transparansi dana BOS diterapkan, tanpa analisis mendalam 2. Bersifat deskriptif sederhana, bukan evaluatif dan tidak menggunakan kerangka analisis tematik 3. Fokusnya terbatas pada kepatuhan terhadap juknis BOS 4. Cakupan bahasan hanya seputar perencanaan, penggunaan,	1. Memiliki struktur evaluasi multi-subfokus yang jauh lebih komprehensif 2. Menyajikan temuan empiris yang lebih kaya dan berbasis coding tematik 3. Memberikan rekomendasi manajerial yang lebih tajam dan aplikatif 4. Memadukan teori <i>governance</i> , transparansi publik, dan manajemen pendidikan secara terpadu

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian (berfokus pada penelitian lawan)	Originalitas Penelitian
			<p>pembukuan, dan pelaporan dana BOS</p> <p>5. Tidak memeriksa aspek aksesibilitas informasi publik secara detail</p> <p>6. Tidak mengulas struktur sistem informasi, media publikasi, atau mekanisme partisipasi sekolah</p> <p>7. Hasilnya bersifat afirmatif (menyatakan sekolah “cukup baik”) tanpa evaluasi kritis</p> <p>8. Sumber data lebih sempit dan tanpa triangulasi analitik yang mendalam</p>	<p>5. Konteks sekolah dan dinamika implementasi BOS yang berbeda, sehingga menghasilkan kebaruan konteks</p>

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian (berfokus pada penelitian lawan)	Originalitas Penelitian
10	Rulya Ryanti (2023) Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Studi Kasus SD Negeri 01 Sawahan Kota Padang	1. Mengkaji transparansi pengelolaan dana BOS 2. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus 3. Menilai keterlibatan pemangku kepentingan (kepala sekolah, guru, komite) 4. Menyimpulkan bahwa sekolah telah menerapkan transparansi dengan relatif baik	1. Hanya menilai kepatuhan juknis BOS dan pelibatan pihak sekolah, belum menganalisis dimensi transparansi secara struktural 2. Analisis masih bersifat deskriptif dan berbasis indikator umum, bukan evaluasi mendalam 3. Fokusnya terbatas pada mekanisme internal (guru–komite–laporan fisik), belum menilai transparansi publik eksternal dan akses digital	1. Menggunakan kerangka analisis empat subfokus evaluatif modern, sehingga lebih komprehensif 2. Memeriksa komponen yang tidak diteliti dalam penelitian lawan 3. Menyertakan analisis tematik berbasis data lapangan, bukan sekadar deskripsi kepatuhan 4. Menawarkan rekomendasi berbasis <i>governance</i> , teknologi digital, dan penguatan sistem informasi, yang tidak ada dalam penelitian pembanding

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian (berfokus pada penelitian lawan)	Originalitas Penelitian
			<p>4. Tidak menggunakan subfokus evaluatif</p> <p>5. Tidak membahas tantangan implementasi, hambatan teknis, atau integrasi sistem informasi sekolah</p> <p>6. Tidak menyinggung strategi komunikasi, audit eksternal sistematis, atau manajemen pelaporan modern</p> <p>7. Referensi teoritis dan analitis minim, hanya mengaitkan dengan UU dan juknis</p>	<p>5. Konteks penelitian berbeda (SMP negeri perkotaan dengan dinamika transparansi digital), menghasilkan kebaruan fenomenologis</p>

Penelitian "**Transparansi Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus di SMPN 103 Jakarta)**" memiliki karakteristik yang secara signifikan membedakannya dari sepuluh penelitian terdahulu baik dari sisi lokasi, pendekatan,

indikator analisis, maupun sudut pandang partisipatif. Sepuluh penelitian sebelumnya oleh Ali Mukodas (2025), Zakiyatul Maghfiroh (2024), Ni Ketut Yuli Artini (2024), Apriansi (2023), Agung Ridwansyah (2025), Melissa Nathania Simanjuntak (2024), Ratih Kusumastuti (2023), Kunto Gemilang Sakti (2022), Meidikia Dora Diaresta (2020), dan Rulya Ryanti (2023) umumnya berfokus pada pengelolaan dana BOS di tingkat SMA, menggunakan pendekatan evaluatif kuantitatif atau deskriptif administratif, riset hanya menyoroti prinsip transparansi tanpa mengulas indikatornya, dengan objek penelitian yang berada di luar konteks urban Jakarta Timur. Sementara itu, penelitian di SMPN 103 Jakarta membawa pendekatan kualitatif studi kasus dengan eksplorasi mendalam terhadap empat indikator utama transparansi: ketersediaan informasi, aksesibilitas, keterlibatan publik, dan pelaporan keuangan secara digital.

Dari sisi originalitas, penelitian ini mengkaji transparansi bukan hanya sebagai bagian dari kepatuhan administratif, tetapi juga sebagai proses sosial dan digital yang mencerminkan keterlibatan warga sekolah dan akses publik terhadap dana pendidikan. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang berfokus pada hubungan antar variabel atau akuntabilitas internal, penelitian ini menyentuh dimensi partisipatif dan sistem informasi daring seperti ARKAS dan SIPLah, serta menyelidiki bagaimana sekolah menghadirkan laporan keuangan secara terbuka dan mudah diakses. Pendekatan ini belum pernah dibahas secara sistemik dalam lima penelitian terdahulu.

Urgensi penelitian ini terletak pada kondisi nyata di SMPN 103 Jakarta, yang meskipun merupakan sekolah negeri urban dengan populasi siswa yang besar, justru menunjukkan praktik transparansi pembiayaan pendidikan yang relatif optimal. Sekolah ini secara aktif memanfaatkan sistem digital seperti ARKAS dan e-RKAS, serta melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaporan anggaran. Di tengah tantangan otonomi sekolah, kompleksitas birokrasi, dan tuntutan implementasi Kurikulum Merdeka yang menekankan prinsip akuntabilitas, keberadaan praktik baik ini menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih dalam. Penelitian ini hadir sebagai upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung keberhasilan transparansi di satuan pendidikan negeri perkotaan, serta

menggali model tata kelola yang dapat direplikasi di sekolah lain sebagai bagian dari penguatan kebijakan pendidikan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Dari aspek *research gap*, belum ada satu pun dari kesepuluh penelitian terdahulu yang secara eksplisit dan sistematis meneliti bagaimana keterbukaan informasi publik dalam konteks digital benar-benar diimplementasikan secara optimal di lingkungan sekolah negeri urban. Penelitian sebelumnya lebih terfokus pada aspek pengelolaan internal, hubungan antar variabel statistik, atau evaluasi administratif formal, tanpa mengangkat secara mendalam dimensi partisipasi warga sekolah dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung transparansi. Selain itu, masih minim kajian yang secara khusus meneliti sekolah dengan karakteristik otonomi manajerial tinggi dan alokasi anggaran yang besar, yang semestinya menjadi model penerapan tata kelola yang baik. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji SMPN 103 Jakarta sebagai studi kasus yang menunjukkan praktik transparansi yang relatif berhasil. Fokus penelitian tidak hanya pada aspek teknis pelaporan, tetapi juga pada persepsi warga sekolah, pola komunikasi, peran kepemimpinan, serta faktor pendukung yang memungkinkan terwujudnya keterbukaan informasi pembiayaan pendidikan secara digital dan partisipatif. Temuan ini diharapkan menjadi kontribusi penting dalam merumuskan kerangka *best practices* dan arah kebijakan tata kelola pendidikan di era transformasi digital.

Adapun *novelty* utama dari penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang menggabungkan empat indikator transparansi secara konkret dan terintegrasi: ketersediaan informasi, aksesibilitas, keterlibatan publik, dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Penelitian ini tidak hanya mendokumentasikan keberhasilan implementasi transparansi di SMPN 103 Jakarta, tetapi juga mengulas secara kritis mekanisme dan faktor pendukung yang memungkinkan praktik tersebut berjalan secara optimal di satuan pendidikan negeri perkotaan. Fokus pada aksesibilitas publik terhadap data keuangan sekolah melalui media digital menjadi sorotan utama yang belum menjadi fokus eksplisit dalam lima penelitian terdahulu. Selain itu, kajian ini memberikan kontribusi baru dengan menelaah keterlibatan aktif warga sekolah baik guru, komite, maupun orang tua dalam proses perencanaan dan pengawasan dana secara partisipatif, dalam kerangka regulatif dan dinamika

praktik lokal di Jakarta Timur. Dengan mengangkat kasus dari sekolah negeri di ibu kota yang telah berhasil menerapkan prinsip transparansi, penelitian ini juga mengisi kesenjangan geografis dan kontekstual dalam literatur, yang selama ini lebih banyak didominasi oleh studi di daerah rural atau di luar wilayah Jakarta. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya perspektif dalam pengembangan model tata kelola pendidikan yang transparan, adaptif, dan berbasis bukti di era digital.

Ketiadaan analisis mendalam mengenai transparansi pembiayaan pada satuan pendidikan menengah pertama yang telah berhasil menerapkannya secara optimal mempertegas kesenjangan dalam kajian literatur. Penelitian berjudul **Transparansi Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus di SMPN 103 Jakarta)** dirancang untuk menyintesis temuan-temuan terdahulu sekaligus menawarkan perspektif baru berupa analisis kritis dan komprehensif terhadap praktik keterbukaan keuangan di satuan pendidikan negeri perkotaan yang menunjukkan capaian positif. Kajian ini menelaah bagaimana transparansi diwujudkan secara konkret melalui sistem digital dan partisipasi warga sekolah, mengidentifikasi faktor sosial-ekonomi serta kelembagaan yang mendukung keberhasilannya, dan mengkaji implikasi dari praktik baik tersebut terhadap penguatan tata kelola dana sekolah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi kekosongan studi sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi aplikatif bagi pengembangan model transparansi yang dapat direplikasi di sekolah lain.